

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis, konsep implementasi menurut kamus webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implement*. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023) implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam (Aurellia, 2022) implementasi memiliki inti pengertian sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari perencanaan hingga yang matang hingga sampai pelaksanaan dilakukan.

2.2.2 Tujuan Implementasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menurut (Aurellia, 2022) implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh:

1. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
2. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi.

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi suatu proyek atau rencana dapat berjalan dengan baik dengan dipengaruhi beberapa faktor terkait. Menurut (Aurellia, 2022) ada beberapa faktor diantaranya yakni:

1. Pemahaman Target Yang Dituju

Ini adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah proyek. Diperlukan adanya konsep dan langkah-langkah yang matang dan harus tercapai untuk mencapai tujuan.

2. Pengadaan Sumber Daya

Penting untuk mencari sumber daya agar mampu menguraikan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan implementasi.

3. Seberapa Detail Menganalisis Resiko

Tim implementasi menggunakan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah. Jika suatu rencana gagal untuk diterapkan, lalu apa kemungkinan terburuknya? Bagaimana penanganannya? Jauh lebih menguntungkan jika dilakukan atau tidak dilakukan? Jika semua jawaban belum dapat terjawab dengan pasti, maka rencana harus dipertimbangkan ulang.

4. Menghargai Waktu Tenggang

Cantumkan waktu penyelesaian yang ditargetkan dan tenggat waktu untuk mulai implementasi. Hal ini akan berkaitan dengan peran dan tanggung jawab dari pemangku kepentingan, sebab harus

sadar porsi kerjanya masing-masing agar implementasi dapat berjalan dengan segera.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi implementasi sangat penting dalam menjalankan rencana implementasinya, mulai dari pemahaman target yang dituju, pengadaan sumber daya, seberapa detail menganalisis resiko, dan menghargai waktu tenggang harus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2.2 Aplikasi Sempel

2.2.1 Pengertian Aplikasi Sempel

Aplikasi sempel (sistem pelanggan) merupakan salah satu software yang digunakan pada bidang akuntansi. Software ini sangat mudah dipakai dan dapat memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, laporan piutang, laporan laba rugi, dan lainnya.

2.2.2 Manfaat Aplikasi Sempel

Aplikasi sempel dapat membantu sebuah perusahaan untuk berkembang karena aplikasi ini dapat membantu mengelola keuangan yang baik. Selain itu manfaat aplikasi sempel seperti:

1. Efisiensi pekerjaan dan produktivitas perusahaan meningkat karena seluruh aktivitas keuangan sudah otomatis
2. Meminimalisir kesalahan perhitungan
3. Mudah untuk digunakan perusahaan
4. Dapat melihat transaksi dari jauh

Dari uraian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa aplikasi simpel bermanfaat dalam membatu perumda dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan karena semuanya sudah otomatis.

2.2.3 Fitur-Fitur Aplikasi Sempel

Aplikasi simpel memiliki beberapa fitur yang ada sepeti:

1. Pencatatan penerimaan pembayaran
2. Manajemen penagihan dan faktur
3. Mencatat jurnal-jurnal transaksi
4. Laporan keuangan

2.3 Piutang

Piutang adalah salah satu kata yang lazim kita dengar dalam istilah ekonomi. Setiap perusahaan memiliki berbagai jenis aktiva dan pasiva yang mengisi neraca keuangan, salah satunya adalah piutang. Dalam akuntansi, alasan terjadinya piutang adalah belum masuknya pembayaran secara lunas kepada perusahaan saat periode jurnal ditutup.

2.3.1 Pengertian Piutang

Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/jasa tapi belum membayarnya dengan lunas (Siti, 2023). Proses pembayaran piutang haruslah jelas, oleh karenanya diberlakukan masa jatuh tempo. Piutang dapat didefinisikan sebagai hak atau klaim perusahaan dalam menerima sejumlah kas, barang ataupun jasa atas dimasa depan sebagai akibat

dari kesepakatan masa lalu. Bila mana sebuah perusahaan terhalang untuk mengklaim piutangnya di luar waktu yang disepakati, maka piutang tersebut masuk ke dalam jurnal tersendiri, yakni jurnal piutang tak tertagih.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan piutang adalah sebuah aktiva lancar pada sebuah perusahaan karena adanya transaksi penjualan berupa barang atau jasa kepada suatu pihak.

2.3.2 Ciri-Ciri Piutang

ciri piutang dapat dianalisis melalui lamanya tanggungan utang yang harus dibayar sebelum waktu yang disepakati. Menurut (Siti, 2023) terdapat 3 ciri-ciri piutang yaitu:

1. Adanya Tanggal Jatuh Tempo

Piutang adalah transaksi dengan jatuh tempo tertentu berdasarkan kesepakatan pihak debitur (yang berhutang) dan kreditur (pemberi hutang). Tanggal jatuh tempo penting guna menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Penentuan jatuh tempo juga akan memudahkan akuntan dalam menyusun jurnal keuangan periodik.

2. Adanya Bunga Yang Berlaku

Ciri berikutnya yaitu adanya bunga yang berlaku, umumnya perusahaan memberlakukan bunga sebagai konsekuensi dari adanya penundaan waktu pembayaran. Bunga yang diberikan sangat bervariasi, bergantung pada kebijakan kreditur. Perusahaan selaku pihak kreditur dapat menentukan apakah piutang

yang dikeluarkannya memiliki bunga atau tidak. Jika perusahaan mewajibkan piutang dengan bunga, maka pelaporannya dalam jurnal wajib disendirikan.

3. Memiliki Konsekuensi Telat Pembayaran

Ciri yang terakhir pada piutang yaitu diberlakukannya konsekuensi apabila terjadi gagal bayar dari masa jatuh tempo yang telah disetujui. Konsekuensi tersebut dapat berupa blacklist atau larangan total untuk melakukan kredit barang maupun jasa. Selain blacklist, pihak perusahaan juga dapat melaporkan debitur kepada pihak berwajib.

Dari penjelasan diatas, ciri-ciri piutang dapat diambil kesimpulan bahwa piutang perlu adanya tanggal jatuh tempo sebagai dasar kesepakatan kreditur dengan debitur, dan adanya bunga sebagai konsekuensi dari penundaan waktu pembayaran, serta adanya konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

2.3.3 Jenis-Jenis Piutang

Berdasarkan transaksinya, piutang memiliki beberapa jenis yaitu:

1. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah piutang yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang, karena terjadinya disebabkan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Piutang usaha tidak selalu terjadi karena

konsumen membeli secara kredit. Beberapa faktor lain penyebab terjadinya piutang usaha adalah pre-order barang, sistem distribusi stok ritel, dan cicilan menggunakan pihak ketiga.

2. Piutang Wesel (Notes Receivable)

Piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antar kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain, dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Saat memberikan piutang wesel, umumnya perusahaan akan mengeluarkan surat kontrak di atas materai, dengan tanggal jatuh tempo dan bunga tertera. Apabila pihak penerima hutang melanggar, maka perusahaan berhak melakukan konsekuensi sesuai kesepakatan dalam surat kontrak tersebut.

3. Piutang Lain-Lain

Sementara itu, piutang lain-lain adalah piutang di luar piutang dagang dan wesel. Beberapa hal yang termasuk dalam piutang lain lain misalnya gaji karyawan di bayar di depan, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan berdasarkan transaksinya terdapat tiga jenis piutang yaitu piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Dengan membedakan jenisnya perusahaan dapat dengan lebih mencatat piutang yang ada. Selain jenis-jenis piutang yang telah dijelaskan, adapun jenis piutang lain-lain seperti:

1. Piutang Lancar

Piutang lancar merupakan piutang yang dibayarkan sesuai tanggal tertagih. Misalnya piutang gaji, restitusi pajak, dan uang muka karyawan.

2. Piutang Tidak Lancar

Piutang tidak lancar merupakan piutang yang dibayarkan melebihi tanggal tertagih sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak pertama yakni pedagang.

3. Piutang Yang Dihapuskan

Piutang yang dihapuskan merupakan piutang yang sudah hangus atau tidak dapat lagi ditagih dikarenakan pembeli atau konsumen mengalami kerugian.

4. Piutang Dicadangkan

Piutang dicadangkan yaitu piutang yang sejak awal sudah disisihkan guna menghindari jumlah yang tidak tertagih.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis piutang tidak hanya berdasarkan transaksinya, namun terdapat piutang dengan kondisi tertentu seperti piutang lancar yang dibayarkan sesuai dengan tanggal tertagih, ada juga piutang yang dihapuskan karena sudah hangus atau tidak dapat ditagih, dan lain sebagainya.

2.4 Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih merupakan jenis piutang dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya. Tidak ada perusahaan yang menginginkan piutang

tidak tertagih (*bad debts*). Meski demikian, piutang tak tertagih adalah kondisi umum terjadi di dunia bisnis.

2.4.1 Pengertian Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih (*bad debt*) adalah jenis piutang di mana debitur tidak mau atau tidak mampu untuk melunasi kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditetapkan (Hermawati, 2023). Seharusnya hasil penjualan produk membawa perusahaan kepada keuntungan. Namun adanya piutang membuat kondisi berbanding terbalik. Piutang gagal bayar ini dapat merugikan perusahaan karena mengganggu profitabilitas bisnis. Pasalnya, pendapatan dari penjualan produk/jasa tidak bisa diperoleh karena debitur (pembeli) tidak mampu membayar hutangnya.

2.4.2 Kriteria Piutang Tak Tertagih

Tidak semua debitur yang tidak membayar hutangnya langsung masuk dalam kategori piutang tak tertagih. Menurut (Hermawati, 2023) sebuah piutang yang termasuk dalam piutang tak tertagih memiliki beberapa kriteria yaitu:

1. Piutang Telah Memiliki Usia Tertentu

Setiap perusahaan memiliki kebijakan dan aturan terkait jangka waktu piutang. Debitur yang belum membayar hutang hingga waktu jatuh tempo yang ditetapkan perusahaan, maka perusahaan akan memberikan rentang waktu agar dapat membayar sampai lunas. Namun demikian, rentan waktu yang diberikan oleh perusahaan memiliki batas waktu. Jika dalam batas tersebut debitur tidak

membayar, maka perusahaan kreditur dapat menggolongkannya sebagai piutang tak tertagih (*bad debts*).

2. Penagihan Telah Dilakukan

Ketika perusahaan telah berupaya menagih dan mengingatkan berulang kali, tapi tidak ada itikad baik debitur untuk membayar. Perusahaan telah melakukan segala cara untuk menagih piutang, tapi debitur tetap tidak membayar, maka perusahaan perlu memasukkan piutang tersebut ke akun piutang tidak tertagih.

3. Debitur Mengalami Kebangkrutan

Biasanya, terdapat barang jaminan dalam kredit yang dilakukan konsumen. Ketika debitur bermasalah dan macet membayar hutang, pihak kreditur akan mengambil hak milik barang jaminan atau lainnya untuk dijual agar uang pinjaman kembali. Sayangnya, hal ini tidak bisa dilakukan pada pihak debitur yang mengalami kebangkrutan, arena kehabisan aset (termasuk uang dan barang jaminan), maka pihak debitur mutlak tidak mampu membayar. Saat perusahaan memiliki debitur semacam ini, maka dapat dipastikan hutang debitur tersebut masuk piutang tak tertagih.

4. Debitur Dipastikan Gagal Bayar Karena Kejadian Tertentu

Kriteria terakhir dari piutang tak tertagih adalah saat debitur mengalami kejadian tertentu yang menhanguskan seluruh harta kekayaannya. Misalnya terjadinya bencana alam, kebakaran, dan sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua piutang dapat dikategorikan sebagai piutang tak tertagih karena piutang tak tertagih memiliki kriteria sendiri mulai dari piutang tersebut telah memiliki usia tertentu, telah dilakukan penagihan, serta debitur mengalami kebangkrutan atau gagal bayar karena kejadian tertentu.

2.4.3 Faktor Terjadinya Piutang Tak Tertagih

Kesulitan kondisi keuangan yang dialami debitur merupakan penyebab utama terjadinya piutang tak tertagih. Menurut Rivai dalam (Hermawati, 2023) menyebutkan bahwa piutang tak tertagih ini disebabkan oleh dua faktor, faktor internal (dari pihak kreditur) dan faktor eksternal (dari pihak debitur). Ada beberapa faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dari pihak kreditur, diantaranya meliputi:

1. Teledor dan kurang teliti ketika membuat perjanjian utang piutang
2. Terlalu mudah memberikan pinjaman karena tidak memiliki standar yang jelas mengenai beberapa jumlah kekayaan yang dimiliki calon debitur agar bisa memperoleh piutang
3. Kinerja staf piutang yang kurang memadai seperti lemahnya pengawasan piutang

4. Ketidakmampuan dalam mendeteksi risiko timbulnya piutang tak tertagih termasuk kondisi arus kas debitur

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya piutang tak tertagih yang berasal dari debitur, diantaranya meliputi: faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya piutang tak tertagih yang berasal dari debitur, diantaranya meliputi:

1. Merosotnya kondisi perekonomian perusahaan debitur, baik karena menurunnya kondisi ekonomi secara umum atau hanya pada bidang usaha yang mereka geluti
2. Kebangkrutan
3. Kurang cakap dalam mengelola arus kas perusahaan
4. Masalah keluarga, seperti kematian, perceraian, terkena penyakit serius, dan penyelewengan dana usaha oleh salah satu anggota keluarga debitur
5. Terjadi kondisi di luar kuasa debitur misalnya bencana alam, pandemi, dan peperangan
6. Debitur memiliki watak yang buruk dan sedari awal memang berencana untuk tidak membayar hutangnya

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya piutang tak tertagih dari faktor internal maupun eksternal adalah kemampuan dari seorang debitur dalam menyelesaikan hutangnya.

2.5 Perumda (Perusahaan Umum Daerah)

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, prinsip otonomi seluas luasnya digunakan dalam pemerintahan daerah untuk mengelola urusan pemerintahan. Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membantu Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan perusahaan daerah. Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang (Bagus, 2020). Tujuan perusahaan daerah adalah untuk ikut serta dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketenteraman dan kepuasan kerja di tempat kerja, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Berdasarkan (PP No 54, 2017) bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Oleh karena itu, seluruh BUMD wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda.

Begitu pula dengan Perusahaan Daerah–Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.

Dibandingkan dengan BUMD berbentuk perseroan terbatas, keuntungan perumda meliputi berkonsentrasi pada fungsi pelayanan umum dan mendorong pelaksanaan pembangunan. Selain itu, proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan dengan BUMD berbentuk perseroan terbatas. Selain itu, kepala daerah adalah pengambil keputusan tertinggi dan tidak dapat dipailitkan karena aset perumda adalah aset daerah dan tidak dapat disita. Kerugian perumda dan kelangsungan usahanya bergantung pada politik tarif dan harga pemerintah, terutama oleh kepala daerah yang menjabat. Semua keuntungan atau keuntungan berasal dari keuntungan negara atau daerah, sehingga jika ada kerugian, itu akan mengakibatkan kerugian bagi negara atau daerah. Pengelolaan perumda terikat pada aturan birokrasi, sehingga rentan digunakan sebagai alat politik kelompok tertentu, dan penambahan modal sangat bergantung pada keuangan nasional.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti yang peneliti lakukan. Dalam hal ini peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Berikut jurnal penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada tabel 2.1 dibawah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sandra & Mustika (2023)	Analisis Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Dan Pelaporan Pajak Berbasis Aplikasi Pada CV Afiq Intan Perwira	Metode kualitatif dan deskriptif	Sistem akuntansi yang akan diimplementasikan yaitu ABSS Accounting, yang merupakan sistem akuntansi yang lebih memadai dan dapat diandalkan dari pada dengan menggunakan Microsoft Excel. Pelaporan perpajakan secara elektronik dapat mempermudah dalam pelaporan SPT masa dan tahunan baik untuk

				SPT badan maupun SPT lainnya
2	Husna & Masripah (2021)	Implementasi Aplikasi Akuntansi Dalam Laporan Keuangan Pada Usaha Dagang	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil Laporan keuangan Rugi/Laba sebesar Rp 8.040.333, saldo neraca sebesar Rp 314.742.833, dan analisa rasio keuangan berupa Current Ratio sebesar 584,46%, Debt to Capital Asset sebesar 16,72%, Debt to Equity Ratio sebesar 31,22%, Return On Equity sebesar 4,77% , dan Return on asset sebesar 2,55%
3	Ramadhan & Priyanti (2022)	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan dari aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe kurang efektif, tetapi dalam pelaksanaan Siskeudes sudah sesuai dengan

		Di Desa		peraturan. Indikator
		Telukjambe		komunikasi
		Kecamatan		menunjukkan bahwa
		Telukjambe		komunikasi yang
		Timur		terjalin antara para
		Kabupaten		stakeholder sudah baik,
		Karawang		namun terdapat
				permasalahan pada
				sumberdaya yang ada
				dalam mendukung
				implementasi aplikasi
				Siskudes
4	Kusumawardani et al. (2020)	Analisis Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Work Order Android Menggunakan Metode UTAUT Pada PDAM Kota Malang	Metode Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif maupun negatif. Ekspektasi Kinerja terbukti tidak berpengaruh terhadap Niat Perilaku, sedangkan Ekspektasi Usaha dan Pengaruh Sosial berpengaruh

					positif dan signifikan terhadap Niat Perilaku
5	Setiani et al. (2022)	Penerapan Penggunaan Aplikasi Bukukas Untuk Pencatatan Keuangan Pada Umkm Keripik Pisang	Metode Deskriptif Kualitatif		UMKM Keripik Pisang bisa dengan mudah melakukan pencatatan keuangan, serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang pencatatan keuangan dan konsep laporan keuangan, dan dapat membantu melakukan pencatatan keuangan
6	Simanullang & Khoiriyah (2021)	Analisis Implementasi Aplikasi Konsep Basis Data Relasional Pada Sistem Pelaporan Dan Buku Besar Pt.	Metode Kualitatif Deskriptif		Pengaplikasian sistem buku besar dan pelaporan keuangan memiliki peran dan manfaat yang besar bagi berlangsungnya aktivitas perusahaan. Dalam hal ini perusahaan Shopee telah melakukan juga

		Shopee Indonesia		sistem buku besar dan pelaporan keuangan di dalam berlangsungnya aktivitas perusahaannya
7	Rahman et al. (2023)	Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti)	Metode Kualitatif Deskriptif	Mengindikasikan bahwa penerapan aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I telah diimplementasikan dengan baik serta membawa banyak pengaruh positif dan sangat mendukung seluruh aktivitas, tugas pokok dan fungsi KPPN
8	Setia (2020)	Implementasi Aplikasi Perhitungan Gaji Pegawai Pada Perusahaan Air	Metode Kualitatif Deskriptif	penggunaan sistem penggajian sebelumnya menggunakan Microsoft Excel masih memiliki beberapa kekurangan seperti

		Minum (Pdam) Kabupaten Ponorogo		resiko data yang hilang, pencarian data yang cukup lama dan rawannya human error
9	Astuti et al. (2022)	Implementasi Aplikasi Quizizz Untuk Keaktifan Peserta Didik Kelas Daring Pada Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan	Metode Kualitatif Deskriptif	Sangat membantu untuk pembelajaran daring, meningkatkan belajar dan pemahaman peserta didik. Aplikasi Quizizz lebih mudah diakses dan digunakan dari pada aplikasi yang pernah peserta didik gunakan yaitu Google Classroom
10	Anwar & Hadi (2022)	Implementasi Aplikasi Sakti Dan Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	Metode Kualitatif	Bahwa penerapan SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan, proses bisnis dalam modul General Ledger and Reporting (GLP), dan pembagian peran

pengguna dalam
pengoperasian SAKTI
dan SPAN sesuai
dengan teori, peraturan,
dan ketentuan yang
berlaku

Sumber : Penelitian terdahulu (2024)